

**PENGARUH NASIONALISME, TINGKAT PENDAPATAN,
KEPERCAYAAN PADA OTORITAS PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
MEMBAYAR PAJAK PRIBADI**

Sri Lestari Yuli Prastyatini

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
e-mail: tari.srilestariyp@gmail.com

Wilis Rahmawati

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
e-mail: wilisrahmawati@gmail.com

ABSTRACT

Individual taxpayer compliance starts from an internal decision whether to comply or not to pay the tax. It turns out that there are still individual taxpayers who do not fulfill their obligations to pay taxes. Seeing this phenomenon, this study aims to determine several factors that can influence compliance to pay personal taxes, namely nationalism, level of income, and trust in the tax authority, especially in the city of Yogyakarta. The data source used is primary data with quantitative methods from 122 respondents. The sampling method was incidental sampling, namely taking samples that were not accidentally encountered by the researcher and suitable for the sample, then processed based on the multiple linear regression analysis methods of the SPSS application version 20. The results of data processing showed that nationalism, income levels, and trust in the tax authorities were factors has a positive effect on compliance with paying personal taxes in the Yogyakarta City area.

Keywords: *tax; compliance; influence; quantitative; primary*

ABSTRAK

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dimulai dari keputusan internal apakah bersikap patuh atau tidak untuk membayar pajak tersebut. Ternyata masih ditemukan wajib pajak orang pribadi yang tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak. Melihat fenomena tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan membayar pajak orang pribadi yaitu nasionalisme, tingkat pendapatan, dan kepercayaan pada otoritas pajak khususnya di wilayah Kota Yogyakarta. Sumber data yang digunakan adalah data primer dengan metode kuantitatif dari 122 responden. Metode pengambilan sampel melalui insidental sampling yaitu mengambil sampel yang tidak sengaja ditemui oleh peneliti dan cocok untuk sampel kemudian diolah berdasarkan metode analisis regresi linear berganda dari aplikasi SPSS versi 20. Diperoleh hasil olah data yang menunjukkan bahwa faktor nasionalisme, tingkat pendapatan dan kepercayaan pada otoritas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak orang pribadi di wilayah Kota Yogyakarta.

Kata kunci: pajak; kepatuhan; berpengaruh; kuantitatif; primer

1. PENDAHULUAN

Indonesia masih termasuk negara berkembang, hal ini akan membuat pemerintah melakukan perkembangan dan pembangunan untuk memajukan negara, sehingga dibutuhkan adanya pemasukan kas negara yang memadai untuk merealisasikannya. Melalui potongan pajak dengan menargetkan jumlah kepatuhan membayar pajak pribadi di seluruh Indonesia sebagai contoh Daerah Istimewa Yogyakarta yang diketahui per 17 Maret 2022, jumlah wajib pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahunan ada sekitar 155.091 wajib pajak. Jumlah ini terdiri atas Wajib Pajak Badan dengan 5.681 Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), Wajib Pajak Non Karyawan dengan 11.246 Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), dan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan sebanyak 138.164 Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Keseluruhan jumlah ini ada di kisaran angka 40 persen dari total Wajib Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang harus mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) (DIY, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa masih ditemukan sekitar 60 persen yang tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sampai bulan Maret 2022. Melihat jumlah tersebut, dapat disimpulkan masih banyak wajib pajak orang pribadi di wilayah Yogyakarta yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Rendahnya angka kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan membayar pajak dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak khususnya orang pribadi karena kurangnya rasa nasionalisme, tingginya potongan pajak berdasarkan tingkat pendapatannya, dan hilangnya rasa kepercayaan wajib pajak orang pribadi pada otoritas pajak di wilayah kota Yogyakarta.

Nasionalisme adalah usaha meningkatkan rasa cinta kepada negara, berbangsa Indonesia dengan semakin tumbuh rasa memiliki untuk bangsa, membuktikan secara nyata mencapai, mengikuti, dan menyebarkan karakter, kelengkapan, keberhasilan, dan kekuatan negara dalam memiliki jiwa identitas (Tambun & Resti, 2022). Meningkatkan kepatuhan membayar pajak dapat dimulai dengan menumbuhkan rasa nasionalisme atau sikap cinta tanah air terhadap bangsa melalui kesadarannya membayar pajak yang didasarkan tingkat pendapatan oleh masing-masing wajib pajak pribadi diikuti rasa kepercayaan pada otoritas pajak atau pemerintah dari kuasa yang dimilikinya atas peraturan yang memaksa. Dibutuhkan rasa nasionalisme yang tinggi agar seluruh warga Indonesia bersedia membayar pajak di setiap tahun dengan tepat waktu dan sesuai jumlah yang ditetapkan negara tanpa manipulasi atas data pribadi, sehingga setiap masyarakat terutama wajib pajak orang pribadi harus memiliki rasa nasionalisme tinggi. Wajib pajak yang memiliki rasa nasionalisme tinggi akan secara alamiah dengan rela dan semangat membayar pajak karena menyadari manfaat pajak bagi negara. Penelitian Yudianto & Hanifah, (2019), menunjukkan bahwa nasionalisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pendapatan merupakan aliran masuk atau bertambahnya aktiva dengan menyelesaikan suatu kewajiban yang berasal dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa atau aktivitas lain berupa kegiatan utama atau inti yang berkelanjutan pada suatu perusahaan (Santoso, 2013 dalam Nurjanna, 2020). Seseorang atau wajib pajak dengan penghasilan yang tinggi mungkin akan sukarela membayar pajak untuk negara, hal ini akan berbeda pada seseorang yang berpenghasilan lebih rendah tentunya akan dirasa keberatan untuk membayarkan sebagian penghasilannya sebagai potongan wajib pajak orang pribadi, karena dirasa penghasilan yang dimilikinya tersebut hanya cukup untuk kebutuhan utama.

Oleh karena itu, tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Penelitian oleh Eben Ezer (2017), dalam Nugroho & Florientina (2021), menyatakan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepercayaan pada otoritas pajak adalah harapan wajib pajak terhadap kinerja otoritas pajak dengan mengutamakan pelayanan, pertolongan, penjagaan, dan kesiapan dalam menyiapkan seluruh kebutuhan wajib pajak. Otoritas pajak merupakan pegawai pemerintah yang berwenang melaksanakan tugas pemungutan pajak (Sulistiyowati, 2012 dalam Ariani dkk., 2016). Untuk menghindari tindakan yang melawan peraturan hukum perpajakan maka hal ini membutuhkan kepercayaan dari masyarakat terhadap otoritas pajak atau pemerintah atas amanah yang diberikan sebagai salah satu proses pelaksanaan pajak dengan mengharapkan hasil dari tindakannya tersebut untuk kemajuan dan pembangunan negara di masa depan. Sebagai wajib pajak yang patuh seharusnya dapat memenuhi seluruh rangkaian terkait perpajakannya dengan benar dan tepat waktu membayarkan pajak terutang sesuai jumlah nominal tertagih sehingga mencapai target untuk meningkatkan penerimaan kas negara. Hasil penelitian oleh Ariani dkk (2016), kepercayaan terhadap aparat pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kebayoran Lama.

2. RUMUSAN MASALAH

Melihat kasus yang ditemukan pada bagian pendahuluan maka penulis merumuskan pokok masalah untuk mengatasi ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi terutama di wilayah Kota Yogyakarta dengan beberapa faktor yaitu nasionalisme, tingkat pendapatan, dan kepercayaan pada Otoritas Pajak apakah memengaruhi kepatuhan membayar pajak pribadi.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi untuk bidang perpajakan, sehingga berguna bagi kalangan yang membutuhkan referensi terkhusus hubungan nasionalisme, tingkat pendapatan, dan kepercayaan pada Otoritas Pajak dengan kepatuhan membayar pajak pribadi di wilayah Kota Yogyakarta.

3. KAJIAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Penelitian ini menggunakan 3 teori sebagai acuan untuk pemecahan masalah yaitu dengan Teori Atribusi, *Slippery Slope Theory*, dan *Theory of Planned Behavior*.

Teori atribusi dapat dikaitkan dengan kepatuhan membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak sesuai teori atribusi yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti pengetahuan dan manfaat pajak, sedangkan faktor eksternalnya adalah keadilan, pelaksanaan administrasi, dan manfaat pajak. Melihat dari sisi psikologi, atribusi adalah bentuk penilaian mengenai alasan dari tindakan orang lain. Teori atribusi menjelaskan keadaan manusia mengevaluasi dan menentukan alasan perilaku orang lain. Teori atribusi adalah bentuk pemahaman mengenai peristiwa atau sikap yang akan dilakukannya karena asumsi mengenai keadaan eksternal atau internal (Hooper, 2018 dalam Ramadhanty & Zulaikha, 2020). Ada dua variabel yang termasuk faktor internal dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu nasionalisme dan tingkat pendapatan, disebabkan setiap individu

memiliki perbedaan atas dorongan internal wajib pajak untuk patuh atau tidak dalam membayar pajak, sedangkan variabel kepercayaan pada otoritas pajak termasuk faktor eksternal karena dipengaruhi oleh dorongan dari luar seperti keadilan, manfaat pajak untuk perubahan yang lebih memadai di lingkungan sekitar yang ditemuinya sebagai bukti dari hasil kinerja para pegawai otoritas pajak dan pelaksanaan administrasi oleh otoritas pajak terhadap kepatuhan membayar pajak.

Teori *slippery slope* mengkategorikan ke dalam dua variabel penting yaitu adanya rasa percaya dari wajib pajak kepada otoritas pajak (*trust*) dan kekuatan otoritas pajak selama menjalankan seluruh alur dari perpajakan (*power*) sehingga mampu memengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak. *Slippery Slope Theory* yaitu kepercayaan dan kekuatan otoritas pajak yang menjadi penyebab wajib pajak untuk patuh pada kebijakan pemerintah (Kirchler dkk., 2008 dalam Fardan dkk., 2022). Adanya transparansi dan akuntabilitas di setiap rangkaian pelaksanaan pajak dari pemerintah maka hal ini dapat menumbuhkan kepercayaan wajib pajak (Wahl dkk., 2010 dalam Fardan dkk., 2022). Wajib pajak akan percaya apabila aliran dana dari pajak yang digunakan transparan disertai bukti nyata seperti pembangunan yang bermanfaat untuk umum sehingga hasilnya dapat dinikmati masyarakat, hal ini akan membuat wajib pajak bersikap patuh membayar pajak. Teori ini sangat cocok sebagai dasar teori pendukung variabel kepercayaan pada otoritas pajak.

Theory of Planned Behavior berkembang melalui kerangka pikir konseptual yang melatarbelakangi seseorang dalam memutuskan tindakannya tersebut. Keputusan dari sikapnya tersebut berasal dari dalam atau faktor internal maupun dari lingkungan atau faktor eksternal. (Puspitaningrum, 2018). *Behavior Belief* merupakan perilaku melalui rasa ketertarikan dengan mengharapkan hasil. Setiap individu terlebih dahulu harus yakin pada hasil dengan mengharapkan kebaikan yang akan diperoleh untuk mengambil keputusan apakah menindaklanjuti atau tidak. Mengacu *Theory of Planned Behavior pada behavioral belief* yang berarti bahwa keyakinan individu dengan mempertimbangkan hasil atas perilaku yang akan dilakukannya. Keyakinan berperilaku yang akan diambil memengaruhi tindakan dengan niat tiga determinan perilaku yaitu: *Attitude towards behavior* dengan tindakan yang diyakini seseorang terkait hasil yang akan diperoleh ke depannya atas sikap tersebut. *Subjective norm* dengan mempertimbangkan saran atau mencari dukungan dari orang-orang di sekitarnya seperti keluarga, teman, dan konsultan pajak, dan motivasi untuk mencapai harapan tersebut. *Perceived behavioral control* adalah keyakinan dari seseorang untuk mengendalikan sikap tertentu dan suatu kecenderungan tentang kemudahan atau kesulitan untuk melakukannya (Ajzen, 2012 dalam Andreanto, 2013). Variabel nasionalisme tergolong dalam teori perilaku terencana yang disebabkan oleh fondasi untuk mempengaruhi seseorang dalam bersikap atau memutuskan pilihannya dengan rasa cinta tanah air yang dipercaya menyebabkan seseorang memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Hipotesis

Hubungan Nasionalisme dan Kepatuhan Membayar Wajib Pajak Orang Pribadi

Adanya cinta tanah air serta tanggung jawab untuk Indonesia yang lebih baik ke depannya maka hal ini akan mendorong masyarakat mentaati peraturan khususnya di bidang perpajakan yang dibuktikan dengan patuh membayar pajak pribadi demi kemajuan negara.

Nasionalisme adalah rasa setia yang seharusnya dimiliki oleh setiap individu pada negara misalnya dengan memberikan partisipasi untuk pembangunan yang diambil dari subsidi kas negara melalui pajak. Meningkatkan kepatuhan membayar wajib pajak pribadi dengan menumbuhkan rasa nasionalisme sehingga bertanggung jawab membangun dan memajukan bangsa (Purnamasari dkk., 2018 dalam Tambun & Ananda, 2022). Nasionalisme juga dibuktikan melalui partisipasi warga negara terhadap pembangunan negara dan mematuhi kewajibannya membayar perpajakan atas dasar cinta tanah air (Najla Ulfah Salsabila, 2018 dalam Tambun & Ananda, 2022). Sikap nasionalisme harus dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia terutama oleh wajib pajak orang pribadi karena sikap ini sangat diperlukan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang baik untuk patuh terhadap semua aturan yang ditetapkan oleh pemerintah terutama dalam hal perpajakan. Sikap nasionalisme yang telah tertanam dapat dibuktikan dengan tidak ada rasa keberatan dari wajib pajak.

Nasionalisme berkaitan dengan teori atribusi, yang dipengaruhi oleh faktor internal karena setiap individu memiliki perbedaan atas dorongan atau rasa nasionalisme wajib pajak untuk bersikap patuh atau tidak membayar pajak. *Behavior Belief* yaitu perilaku dengan fokus pada hasil yang diinginkan. Individu akan melakukan sesuatu dengan mempertimbangkan hasil ke depannya sehingga memberi keyakinan untuk mengambil keputusan dengan melakukannya atau tidak sebagai wajib pajak yang menyadari pentingnya pajak dalam memajukan negara seperti pembangunan infrastruktur fasilitas dan transportasi umum diharapkan patuh membayar pajak. Rasa nasionalisme harus dipupuk sejak dini agar kepedulian dan rasa tanggungjawab sebagai wajib pajak untuk mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia khususnya di bidang perpajakan. Sejalan dengan teori atribusi dan *Behavior Belief* yang menjelaskan nasionalisme dari wajib pajak mendorong kepatuhannya membayar pajak melalui faktor internal atau harapan mengenai hasil yang telah dilakukannya akan berdampak baik di masa depan sehingga nasionalisme berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak orang pribadi. Perumusan hipotesis ini juga didukung penelitian terdahulu oleh Yulianti & Satyawati (2021) yang membuktikan bahwa sikap nasionalisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menyimpulkan uraian tersebut, maka diambil hipotesis sebagai berikut:

H₁: Nasionalisme berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar wajib pajak orang pribadi.

Hubungan Tingkat Pendapatan dan Kepatuhan Membayar Wajib Pajak Orang Pribadi

Pernyataan dari Kartikahadi dkk (2012), dalam Nurjanna (2020), pendapatan adalah naiknya nilai guna ekonomi dalam satu periode akuntansi melalui masuknya atau tambahan *asset* juga menurunkan utang sehingga menyebabkan kenaikan ekuitas namun tidak diperoleh melalui kontribusi pemilik modal. Tingkat pendapatan merupakan level atau tahap pendapatan yang berupa uang untuk didapatkan seseorang dari hasil usaha yang dikerjakan. Tingkat pendapatan adalah sejumlah uang pendapatan yang diperoleh wajib pajak selama satu tahun sebagai perhitungan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pendapatan yaitu balas jasa atas produksi yang diterima seseorang berupa uang atau barang atau semua perolehan yang dimiliki seseorang berupa uang yang dapat dipakai untuk konsumsi ataupun bertambahnya harta wajib pajak (Rahman, 2018). Tingkat pendapatan berarti memiliki

tingkatan dan beberapa kriteria berbeda berdasarkan besar kecilnya pendapatan wajib pajak, sehingga hal ini akan memengaruhi besarnya potongan pajak yang dipungut. Namun, hal tersebut adil dilakukan untuk menyesuaikan kemampuan wajib pajak sehingga tidak menimbulkan kecemburuan atau iri. Wajib pajak orang pribadi yang memiliki pendapatan besar tentunya akan lebih mudah dalam membayar pajak sedangkan wajib pajak dengan pendapatan yang lebih kecil akan mempertimbangkan dan berpikir berulang kali untuk membayar pajak. Pemerintah sudah menetapkan tingkatan berdasarkan golongan pendapatan wajib pajak dengan menyesuaikan kemampuan tanpa memberatkan pihak manapun karena apabila ditemukan keadaan yang tidak sesuai maka dapat mengajukan surat keberatan sebagai tanda bukti yang memperkuat kebenarannya dengan memenuhi syarat-syarat yang berlaku.

Tingkat pendapatan dalam teori atribusi, sesuai faktor dalam diri atau internal wajib pajak itu sendiri, karena dengan tingkat pendapatan dapat menyebabkan seseorang melakukan berbagai aktivitas kehidupan. Semakin besar pendapatan maka akan semakin banyak kegiatan yang dapat dilakukan seperti memenuhi kewajiban membayar pajak pribadi. Melalui teori atribusi, pada tingkat pendapatan yang berbeda-beda, hal ini berpengaruh positif terhadap tindakannya untuk patuh membayar pajak sesuai perhitungan atas potongan pajak tersebut yang dihasilkan melalui kerja keras serta pengorbanan yang diberikan. Mendukung teori ini dengan penelitian yang dilakukan Nugroho & Florientina (2021), ada pengaruh yang signifikan (bersifat positif) atas kepatuhan pajak antara responden yang memiliki pendapatan per tahun yang rendah dan yang tinggi. Sesuai pemahaman di atas, maka disimpulkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₂: Tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar wajib pajak orang pribadi.

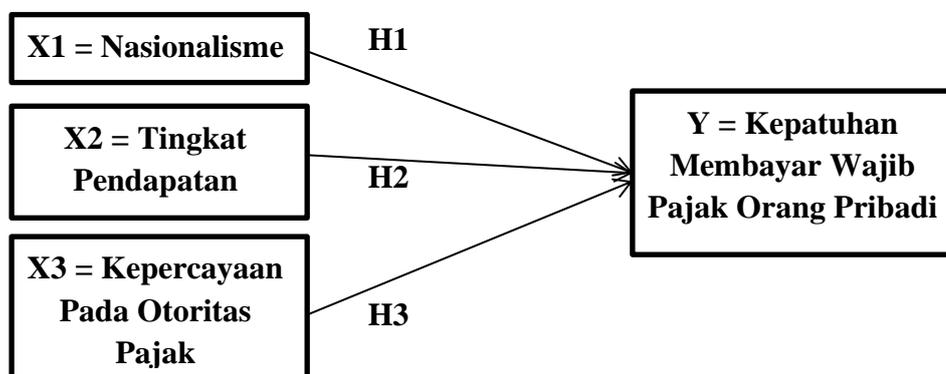
Hubungan Kepercayaan pada Otoritas Pajak dan Kepatuhan Membayar Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepercayaan kepada pemerintah merupakan hal yang hanya dapat dikendalikan oleh pemerintah karena rasa percaya tidak dibentuk secara mendadak namun dibutuhkan sebuah proses (Ibrahim dkk., 2020 dalam Fardan dkk., 2022). Masyarakat yang percaya sistem pemerintah dan hukum akan mematuhi seluruh aturan yang ada termasuk membayar pajak (Fardan dkk., 2022). Kepercayaan pada otoritas pajak merefleksikan penilaian atas hasil yang bermanfaat untuk masyarakat dengan melihat kinerja dan kebijakan yang dilaksanakan oleh para aparat otoritas pajak sehingga dengan adanya perspektif tersebut maka seharusnya mereka menjaga nama baik serta kepercayaan seluruh masyarakat Indonesia melalui manfaat dari hasil pemungutan pajak tersebut. Pernyataan ini akan membuat seluruh masyarakat Indonesia membuka pandangan mengenai kepatuhan membayar pajak pribadi disebabkan oleh rasa kepercayaannya yang begitu besar terhadap otoritas pajak, sehingga diharapkan mampu meningkatkan target penerimaan kas negara. Kepercayaan kepada otoritas pajak sangat merefleksikan penilaian wajib pajak terhadap otoritas pajak apakah tindakan, sikap, dan moralitas yang dilakukan oleh para otoritas pajak menghasilkan suatu keadaan yang membantu masyarakat sehingga menciptakan rasa kepercayaannya pada otoritas pajak. Kepercayaan pada sistem pemerintahan dapat mendorong wajib pajak patuh membayar pajaknya (Latief dkk., 2020 dalam Fardan dkk., 2022). Munculnya tindakan wajib pajak yang selalu patuh melaporkan SPT dan membayar pajak tepat waktu karena terdapat rasa percaya

pada otoritas pajak. Pernyataan oleh Julita dkk (2015), kepercayaan pada sistem peraturan dan hukum pemerintah merupakan bentuk hubungan antara negara dan warga negaranya. Hubungan yang terjalin baik akan meningkatkan rasa kepercayaan wajib pajak sehingga harus dijaga melalui citra positif dan kinerja yang baik. Rasa kepercayaan yang dimiliki wajib pajak harus selalu dijaga oleh pemerintah agar mudah membayar pajak secara berkala karena apabila otoritas pajak sudah tidak percaya oleh masyarakat maka akan sulit untuk mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

Melihat teori atribusi, sikap patuh membayar pajak dapat disebabkan faktor eksternal seperti citra otoritas pajak yang amanah, sehingga akan menumbuhkan rasa kepercayaan pada otoritas pajak yang membuat wajib pajak patuh membayar pajak, begitu juga sebaliknya. Teori *slippery slope* juga mendukung atas kepercayaan pada otoritas pajak yang dapat memengaruhi wajib pajak orang pribadi untuk membayar pajak disebabkan rasa percaya dari wajib pajak dengan menilai dan merasakan hasil kinerja otoritas pajak yang menciptakan perubahan lebih baik. Melalui teori atribusi dengan faktor dari luar atau eksternal mampu memengaruhi kepatuhan wajib pajak pribadi melalui keadilan seperti perlakuan yang sama kepada wajib pajak tanpa mengistimewakan individu manapun. Lingkungan sekitar yang berkembang lebih baik dengan pembangunan jalan disertai akses yang mudah karena pengelolaan dana pajak yang tepat sasaran membutuhkan tanggungjawab dari otoritas pajak atau pemerintah sehingga menumbuhkan rasa kepercayaan dari wajib pajak untuk patuh membayar pajak. Pelaksanaan administrasi yang dipermudah oleh otoritas pajak akan mendorong kepatuhan membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan pada otoritas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar wajib pajak orang pribadi yang diperkuat dengan teori atribusi dan *slippery slope*. Pernyataan ini didukung oleh penelitian Fardan dkk (2022), menyatakan bahwa kepercayaan kepada pemerintah atau otoritas pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Melihat uraian di atas maka dapat diambil hipotesis:

H₃: Kepercayaan pada otoritas berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar wajib pajak orang pribadi.



Gambar 1
Model Penelitian

4. METODA PENELITIAN

Sampel dan Data Penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah dan jenis data yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2013 dalam Nurlaelah, 2022). Sampel yang ditetapkan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di wilayah Kota Yogyakarta yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan aktif membayar pajak. Pengumpulan data primer melalui kuesioner berupa *google form* dan *paper* kuesioner atau *hardcopy* dengan metode insidental sampling atau mengambil sampel yang secara kebetulan ditemui oleh peneliti dan cocok sebagai sampel.

Jumlah responden sebagai sumber data sebanyak 122 responden dengan jumlah 130 kuesioner yang disebar untuk wilayah Kota Yogyakarta dari jumlah kuesioner tersebut hilang 4 dan 4 lainnya tidak sesuai. Pekerjaan responden terbesar adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 65 orang dan terkecil bekerja sebagai “lainnya” yaitu 23 orang, sisanya bekerja sebagai karyawan swasta dengan 34 orang. Jumlah terbesar yang bekerja selama 1-5 tahun yaitu 50 orang, selanjutnya lebih dari 10 tahun adalah 45 orang, 5-10 tahun sebanyak 19 orang dan terkecil bekerja selama kurang dari 1 tahun sebanyak 8 orang. Pendapatan per tahun yang diklasifikasikan dalam dua golongan, yaitu sebesar kurang dari Rp 50.000.000,- sebanyak 117 orang dan Rp 50.000.000,- s/d Rp 250.000.000,- adalah 5 orang.

Penelitian ini menggunakan data primer berupa jawaban atas kuesioner yang berisi pertanyaan mengenai variabel nasionalisme, tingkat pendapatan, kepercayaan pada otoritas pajak dan kepatuhan membayar wajib pajak pribadi yang diukur berdasarkan skala likert dalam empat poin pilihan yang tersedia dengan format seperti berikut: Berdasarkan kriteria mulai dari Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS).

Model regresi linier berganda yang ditunjukkan oleh persamaan berikut:

$$KWP = \alpha + b_1NSM + b_2TPT + b_3KOP + e$$

Keterangan:

KWP = Kepatuhan Membayar Wajib Pajak Orang Pribadi

α = Konstanta

b_1 - b_3 = Koefisien Regresi

NSM = Nasionalisme

TPT = Tingkat Pendapatan

KOP = Kepercayaan pada Otoritas Pajak

e = *error*

5. PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1
Distribusi Frekuensi Rata-Rata Variabel

Variabel	N	STS	TS	S	SS
Nasionalisme (X1)	122	0%	0,8%	36%	63,2%
Tingkat Pendapatan (X2)	122	0,8%	10%	35,2%	54%
Kepercayaan pada Otoritas Pajak (X3)	122	0%	2,8%	63,6%	33,6%
Kepatuhan Membayar Wajib Pajak Pribadi (Y)	122	0,8%	6,5%	41,6%	51,1%

Sumber: Data Primer, 2022, diolah

Jawaban responden atas variabel independen yaitu Nasionalisme (X1), Tingkat Pendapatan (X2), Kepercayaan pada Otoritas Pajak (X3), dan variabel dependen yaitu Kepatuhan Membayar Wajib Pajak Pribadi (Y) yang dapat membantu untuk menjelaskan hasil jawaban responden dengan melihat distribusi frekuensi rata-rata pada setiap variabelnya secara keseluruhan.

Uji Validitas

Tabel 2
Hasil Uji Validitas

No.	Variabel/Indikator	r-Tabel	r-Hitung	Keterangan
1.	Nasionalisme			
	Butir X1.1	0,1779	0,225	Valid
	Butir X1.2	0,1779	0,411	Valid
	Butir X1.3	0,1779	0,386	Valid
	Butir X1.4	0,1779	0,397	Valid
	Butir X1.5	0,1779	0,382	Valid
	Butir X1.6	0,1779	0,441	Valid
	Butir X1.7	0,1779	0,446	Valid
	Butir X1.8	0,1779	0,451	Valid
2.	Tingkat Pendapatan			
	Butir X2.1	0,1779	0,534	Valid
	Butir X2.2	0,1779	0,446	Valid
	Butir X2.3	0,1779	0,418	Valid
	Butir X2.4	0,1779	0,216	Valid
3.	Kepercayaan pada Otoritas Pajak			
	Butir X3.1	0,1779	0,447	Valid
	Butir X3.2	0,1779	0,432	Valid

No.	Variabel/Indikator	r-Tabel	r-Hitung	Keterangan
	Butir X3.3	0,1779	0,376	Valid
	Butir X3.4	0,1779	0,356	Valid
	Butir X3.5	0,1779	0,271	Valid
	Butir X3.6	0,1779	0,333	Valid
	Butir X3.7	0,1779	0,289	Valid
	Butir X3.8	0,1779	0,413	Valid
4.	Kepatuhan Membayar Wajib Pajak Orang Pribadi			
	Butir Y1.1	0,1779	0,443	Valid
	Butir Y1.2	0,1779	0,417	Valid
	Butir Y1.3	0,1779	0,528	Valid
	Butir Y1.4	0,1779	0,420	Valid
	Butir Y1.5	0,1779	0,487	Valid
	Butir Y1.6	0,1779	0,427	Valid
	Butir Y1.7	0,1779	0,247	Valid
	Butir Y1.8	0,1779	0,225	Valid

Sumber: Data Primer, 2022, diolah

Menggunakan data sebanyak 122 yang terdiri dari 28 pernyataan secara keseluruhan dari 4 variabel yaitu 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. Variabel Nasionalisme (NSM) 8 pernyataan, Tingkat Pendapatan (TPT) 4 pernyataan, Kepercayaan pada Otoritas Pajak (KOP) 8 pernyataan, dan variabel Kepatuhan Membayar Wajib Pajak Orang Pribadi (KWP) 8 pernyataan. Seluruh pernyataan dari kuesioner ini sudah dinyatakan valid karena nilai r-hitung pada setiap butir soal lebih besar dari pada r-tabel dengan menentukan besarnya r-tabel ini dapat dilihat berdasarkan tingkat signifikansi uji dua arah karena pada penelitian ini menggunakan pernyataan positif dan negatif. 122 responden yang diukur menggunakan rumus $df = (N-2)$ maka jadi 120 dengan persentase 5 persen atau 0,05 yang diketahui nilai r-tabel yaitu 0,1779.

Uji Reliabilitas

Tabel 3
Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel	Cronbach's Alpha	Batasan	Keterangan
1.	Nasionalisme (X1)	0,959	0,7	Reliabel
2.	Tingkat Pendapatan (X2)	0,959	0,7	Reliabel
3.	Kepercayaan pada Otoritas Pajak (X3)	0,959	0,7	Reliabel
4.	Kepatuhan Membayar Wajib Pajak (Y)	0,959	0,7	Reliabel

Sumber: Data Primer, 2022, diolah

Data yang digunakan sebanyak 122 yang terdiri dari 28 pernyataan secara keseluruhan dari 4 variabel yaitu 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. Variabel Nasionalisme (NSM) 8 pernyataan, Tingkat Pendapatan (TPT) 4 pernyataan, Kepercayaan pada Otoritas Pajak (KOP) 8 pernyataan dan variabel Kepatuhan Membayar Wajib Pajak Orang Pribadi (KWP) 8 pernyataan. Hasil perhitungan program *Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)* dengan jumlah 4 variabel tersebut dinyatakan reliabel disebabkan besarnya *Cronbach's alpha* secara keseluruhan di atas nilai batas 0,7.

Uji Normalitas

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>		
		<i>Unstandardized Residual</i>
N		122
Normal Parameters^{a,b}	<i>Mean</i>	0E-7
	<i>Std. Deviation</i>	1,64269221
Most Extreme Differences	<i>Absolute</i>	,075
	<i>Positive</i>	,066
	<i>Negative</i>	-,075
Kolmogorov-Smirnov Z		,824
Asymp. Sig. (2-tailed)		,506
<i>a. Test distribution is Normal.</i>		
<i>b. Calculated from data.</i>		

Sumber: Data Primer, 2022, diolah

Hasil uji normalitas pada tabel 3 memperoleh nilai signifikansi 2-tailed 0,506 > 0,05 maka hal ini dapat dinyatakan berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinieritas

<i>Coefficients^a</i>			
<i>Model</i>		<i>Collinearity Statistics</i>	
		<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
1	<i>Total NSM</i>	,585	1,710
	<i>Total TPT</i>	,510	1,960
	<i>Total KOP</i>	,544	1,839
<i>a. Dependent Variable: Total KWP</i>			

Sumber: Data Primer, 2022, diolah

Nilai *tolerance* dan *Variance Inflating Factor (VIF)* Nasionalisme (NSM) sebesar 0,585 dan 1,710, Tingkat Pendapatan (TPT) sebesar 0,510 dan 1,960, serta Kepercayaan pada Otoritas Pajak (KOP) sebesar 0,544 dan 1,839. Memperoleh persamaan model regresi tidak ditemukan multikolinearitas maka dengan ini tidak memiliki korelasi di antara variabel independen sehingga pantas untuk digunakan sebagai analisis karena hasil nilai *tolerance* > 0,1 dan nilai *Variance Inflating Factor (VIF)* < 10.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,059	,032		1,816	,072
	Total NSM	,002	,002	,199	1,494	,138
	Total TPT	-,003	,003	-,170	-	,297
	Total KOP	-,002	,001	-,193	1,047	,122
					-	,122
					1,557	

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Data Primer, 2022, diolah

Hasil signifikansi Nasionalisme (NSM) sebesar 0,138, Tingkat Pendapatan (TPT) sebesar 0,297, Kepercayaan pada Otoritas Pajak (KOP) sebesar 0,122. Seluruh nilai tersebut diartikan bahwa NSM, TPT dan KOP > 0,05 sehingga dapat dikatakan terdapat homoskedastisitas disebabkan nilai signifikansi > 5 persen.

Hasil Pengujian Hipotesis

Uji t

Tabel 7
Hasil Uji t

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,003	1,436		1,394	,166
	Total NSM	,350	,060	,334	5,791	,000

<i>Total TPT</i>	,886	,100	,545	8,831	,000
<i>Total KOP</i>	,121	,059	,122	2,040	,044

a. Dependent Variable: Total KWP

Sumber: Data Primer, 2022, diolah

a. Pengujian t hitung Nasionalisme (NSM)

Nilai t hitung variabel Nasionalisme (NSM) sebesar 5,791, nilai koefisien beta sebesar 0,334 dengan arah positif dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga H1 penulis yang menyatakan Nasionalisme (NSM) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Membayar Wajib Pajak Orang Pribadi (KWP) di wilayah Kota Yogyakarta diterima.

b. Pengujian t hitung Tingkat Pendapatan (TPT)

Nilai t hitung variabel Tingkat Pendapatan (TPT) sebesar 8,831, nilai koefisien beta sebesar 0,545 dengan arah positif dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga H2 penulis yang menyatakan Tingkat Pendapatan (TPT) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Membayar Wajib Pajak Orang Pribadi (KWP) di wilayah Kota Yogyakarta diterima.

c. Pengujian t hitung Kepercayaan pada Otoritas (KOP)

Nilai t hitung variabel Kepercayaan pada Otoritas Pajak (KOP) sebesar 2,040 nilai koefisien beta sebesar 0,122 dengan arah positif dan nilai signifikansi sebesar $0,044 < 0,05$ sehingga H3 penulis yang menyatakan Kepercayaan pada Otoritas Pajak (KOP) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Membayar Wajib Pajak Orang Pribadi (KWP) di wilayah Kota Yogyakarta diterima.

Uji F

Tabel 8
Hasil Uji F

		<i>ANOVA^a</i>				
<i>Model</i>		<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	<i>Regression</i>	1098,997	3	366,332	132,39	,000 ^b
	<i>Residual</i>	326,511	118	2,767	1	
	<i>Total</i>	1425,508	121			

a. Dependent Variable: Total KWP

b. Predictors: (Constant), Total KOP, Total NSM, Total TPT

Sumber: Data Primer, 2022, diolah

Nilai hasil uji F sebesar 0,000. Nilai uji F 0,000 ini lebih kecil dari pada tingkat signifikansi $\alpha = 5$ persen, maka hipotesis diterima. Dapat disimpulkan Nasionalisme (NSM), Tingkat Pendapatan (TPT) dan Kepercayaan pada Otoritas Pajak (KOP) secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Membayar Wajib Pajak Orang Pribadi (KWP).

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 9
Hasil Uji R^2

<i>Model Summary</i>				
<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	,878 ^a	,771	,765	1,663
<i>a. Predictors: (Constant), Total KOP, Total NSM, Total TPT</i>				

Sumber: Data Primer, 2022, diolah

Nilai *Adjusted R Square* 0,765 maka hal ini dapat menjelaskan variabel Nasionalisme (NSM), Tingkat Pendapatan (TPT), dan Kepercayaan pada Otoritas Pajak (KOP) berpengaruh secara keseluruhan sebesar 76,5 persen terhadap Kepatuhan Membayar Wajib Pajak Orang Pribadi (KWP).

Pembahasan

Pengaruh Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Membayar Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil uji t menunjukkan bahwa H1 penulis yang menyatakan Nasionalisme (NSM) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Membayar Wajib Pajak Orang Pribadi (KWP) di wilayah Kota Yogyakarta diterima. Hal ini menjelaskan adanya pengaruh yang searah antara nasionalisme dengan kepatuhan membayar pajak pribadi karena rasa nasionalisme dalam diri wajib pajak dapat memengaruhi kepatuhan membayar wajib pajak orang pribadi di wilayah Kota Yogyakarta. Semakin besar nasionalisme wajib pajak kepada negara maka mereka akan rela membayar pajak begitu juga sebaliknya. Sesuai teori atribusi dan *Theory of Planned Behavior* maka nasionalisme berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar wajib pajak orang pribadi disebabkan oleh faktor pendorong internal dengan rasa nasionalisme yang tinggi seperti cinta tanah air yang membuat wajib pajak percaya dan berharap tindakannya tersebut dapat memberikan dampak baik untuk daerah sekitar di masa depan. Hasil penelitian ini sepadan dengan penelitian terdahulu Tambun & Haryati (2022), yang menemukan adanya pengaruh signifikan (bersifat positif) dari nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil uji t menjelaskan bahwa H2 penulis yang menyatakan variabel Tingkat Pendapatan (TPT) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Membayar Wajib Pajak Orang Pribadi (KWP) di wilayah Kota Yogyakarta diterima. Hasil ini memberikan arti pengaruh yang searah pada tingkat pendapatan dengan kepatuhan membayar wajib pajak orang pribadi, sehingga semakin besar tingkat pendapatan yang dimiliki wajib pajak maka hal tersebut akan menyebabkan peningkatan terhadap kepatuhan membayar wajib pajak orang pribadi di wilayah Kota Yogyakarta. Berdasarkan teori atribusi, bahwa suatu perilaku ataupun tindakan disebabkan oleh faktor eksternal dan internal (Sri & May, 2022). Ini sesuai penjelasan teori

atribusi pada faktor internal bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak dengan penghasilan tinggi lebih mudah mentoleransi potongan pajak yang ditetapkan, sedangkan untuk penghasilan yang lebih rendah akan mempertimbangkan dalam membayar pajak meskipun potongan pajak yang dipungut menyesuaikan perhitungan tingkat pendapatannya. Hal ini disebabkan tingkat pendapatan menjadi faktor pendorong dalam diri wajib pajak sehingga dapat mempengaruhi keputusan dalam berperilaku. Semakin besar pendapatan maka semakin banyak kegiatan yang dapat dilakukan seperti memenuhi kewajibannya membayar pajak pribadi. Setiap wajib pajak dituntut membayar pajak sesuai peraturan potongan pajak dari golongan tingkat pendapatannya. Hasil ini sama dengan penelitian Nugroho & Florientina (2021), ada pengaruh yang signifikan (bersifat positif) atas kepatuhan pajak pada responden dengan pendapatan per tahun yang rendah dan yang tinggi.

Pengaruh Kepercayaan pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil uji t membuktikan bahwa H3 penulis yang menyatakan variabel Kepercayaan pada Otoritas Pajak (KOP) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Membayar Wajib Pajak Orang Pribadi (KWP) di wilayah Kota Yogyakarta diterima. Pengaruh yang searah untuk variabel kepercayaan pada otoritas pajak dengan kepatuhan membayar pajak pribadi yang menjelaskan semakin besar rasa kepercayaan akan menyebabkan peningkatan untuk patuh membayar wajib pajak orang pribadi di wilayah Kota Yogyakarta. Teori atribusi dan *slippery slope* mendukung adanya pengaruh yang positif pada variabel kepercayaan pada otoritas pajak terhadap kepatuhan membayar wajib pajak orang pribadi. Melalui teori atribusi, faktor eksternal dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi seperti keadilan dengan memberikan perlakuan yang sama kepada wajib pajak tanpa mengistimewakan siapapun dan lingkungan sekitar yang mengalami perubahan lebih baik seperti fasilitas umum yang nyaman. Pelaksanaan administrasi yang mudah karena dibantu otoritas pajak akan mendorong kepatuhan membayar pajak. Teori *slippery slope* juga mendukung adanya kepercayaan pada otoritas pajak yang dapat memengaruhi wajib pajak orang pribadi untuk membayar pajak yang disebabkan rasa kepercayaan atas kinerja otoritas pajak karena dengan rasa kepercayaan yang tinggi mengenai kinerja otoritas pajak yang berintegritas, jujur, mengabdikan untuk negeri serta bertanggungjawab untuk kemajuan bangsa sehingga hal ini akan lebih mudah bagi wajib pajak orang pribadi untuk taat membayar pajak daripada wajib pajak yang tidak mempercayai kinerja otoritas pajak. Sesuai penelitian Mahadianto & Astuti (2017), menunjukkan kepercayaan kepada otoritas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak sukarela.

6. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI

Simpulan

Kesimpulan dari hasil analisis data dan pembahasan sebelumnya, adalah sebagai berikut:

1. Nasionalisme (NSM) memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Membayar Wajib Pajak Orang Pribadi (KWP) di wilayah Kota Yogyakarta.

2. Tingkat Pendapatan (TPT) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Membayar Wajib Pajak Orang Pribadi (KWP) di wilayah Kota Yogyakarta.
3. Kepercayaan pada Otoritas Pajak (KOP) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Membayar Wajib Pajak Orang Pribadi (KWP) di wilayah Kota Yogyakarta.

Keterbatasan dan Saran

Sampel penelitian ini hanya terbatas pada wajib pajak orang pribadi di wilayah Kota Yogyakarta. Nasionalisme, tingkat pendapatan dan kepercayaan pada otoritas pajak dapat memengaruhi kepatuhan membayar wajib pajak pribadi. Penelitian berikutnya dapat menambah atau mengganti variabel penelitian, misalnya sosialisasi pajak yang bisa ditempatkan sebagai variabel independen, moderasi atau intervening serta dengan metode dan populasi yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreanto, A. (2013). *Aplikasi Teori Perilaku Terencana : Niat Melakukan Physical Exercise (Latihan Fisik) Pada Remaja di Surabaya*. 1–12.
- Ariani, M., Defrianto, D., & Zulhawati, Z. (2016). Pengaruh Sosialisasi, Sanksi, dan Kepercayaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Pph Pasal 21. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 3(02), 161–175. <https://doi.org/10.35838/jrap.2016.003.02.13>
- DIY, H. P. (2022). Tertib Pajak, Sri Sultan Laporkan SPT Tahunan. *JogjaproV.Go.Id*. <https://jogjaproV.go.id/berita/tertib-pajak-sri-sultan-laporkan-spt-tahunan>
- Fardan, M. Z., Nugroho, R., & Susilawati Muamarah, H. (2022). Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6, 107–121.
- Julita, Huda, A., & Basri, Y. M. (2015). *PENGARUH PERSEPSI ATAS EFEKTIFITAS SISTEM PERPAJAKAN, KEPERCAYAAN, TARIF PAJAK DAN KEMANFAATAN NPWP TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA WAJIB PAJAK UMKM MAKANAN DI KPP PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN)*.
- Mahadianto, M. Y., & Astuti, A. D. (2017). Preillage Tax Payer, Sosialisasi Pajak, dan Kepercayaan pada Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(1), 77–86. <https://doi.org/10.33603/jka.v1i1.525>
- Nugroho, V., & Florientina. (2021). Pengaruh Usia, Pendidikan, Tingkat Pendapatan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(2), 612. <https://doi.org/10.24912/jpa.v3i2.11709>
- Nurjanna. (2020). PENGAKUAN DAN PENGUKURAN PENDAPATAN BERDASARKAN PSAK NO. 23 PADA KALLA TOYOTA MAKASSAR. *Molecules*, 2(1), 1–12. <http://clik.dva.gov.au/rehabilitation-library/1-introduction-rehabilitation%0Ahttp://www.scirp.org/journal/doi.aspx?DOI=10.4236/as.2017.81005%0Ahttp://www.scirp.org/journal/PaperDownload.aspx?DOI=10.4236/as.2012.34066%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.pbi.201>

- Nurlaelah. (2022). Pengaruh Persediaan Barang Dagang Terhadap Penjualan Pada Pt. Info Optima Komputasi Tangerang. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Bisnis*, 9(1), 103–112.
- Puspitaningrum, R. R. (2018). *Tesis S-2 Diajukan oleh Ratih Rinda Puspitaningrum PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA*. 1–109.
- Rahman, A. (2018). *PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, TINGKAT PENDIDIKAN, DAN PENDAPATAN TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN*.
- Ramadhanty, A., & Zulaikha. (2020). *PENGARUH PEMAHAMAN TENTANG PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN FISKUS, SISTEM TRANSPARANSI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI* *Aglista*. 9, 1–15.
- Sri, L. Y. P., & May, Y. T. (2022). Pengaruh Capital Intensity, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(3), 943–959. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i3.1419>
- Tambun, S., & Ananda, N. A. (2022). Pengaruh Kewajiban Moral Dan Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Nasionalisme Sebagai Pemoderasi. *Owner*, 6(3), 3158–3168. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.999>
- Tambun, S., & Haryati, A. (2022). Moderasi Sikap Nasionalisme Atas Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(2), 278–289. <https://doi.org/10.22225/kr.13.2.2022.278-289>
- Tambun, S., & Resti, R. R. (2022). Dampak Tax Planning dan Digitalisasi Layanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dimoderasi oleh Nasionalisme. *Owner*, 6(3), 3015–3026. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.909>
- Yudianto, I., & Hanifah, H. (2019). *Pengaruh Religiusitas , Nasionalisme , dan Korupsi Perpajakan*. 2(1).
- Yulianti, T., & Satyawati, E. (2021). *Pengaruh pengetahuan perpajakan,*